

Penerapan ketentuan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran administrative penal law studi kasus putusan penggunaan jaringan 2,1 GHZ 3G PT Indosat Mega Media =
Aplication of eradication of criminal acts of corruption on administrative penal law violation case study decision of 2,1 GHZ 3G network usage by PT Indosat Mega Media

Okti Primurianti Zakaria, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422415&lokasi=lokal>

Abstrak

Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, Jaringan 3G adalah salah satu sumberdaya terbatas yang sangat diperlukan bagi industri telekomunikasi. Pemerintah dituntut untuk mengatur dan mengawasi pemakaian sumberdaya alam tidak terbatas tersebut, salah satunya dengan mekanisme perizinan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Perizinan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang dianggap kurang efektif membuat sanksi pidana akhirnya menjadi jalan untuk penegakan norma hukum administrasi negara, yang dikenal dengan administrative penal law. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai administrative penal law membuat kebingungan disaat terjadi kasus pelanggaran terhadap administrative penal law yang juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kasus semacam itu di satu sisi dapat digolongkan sebagai concursus idealis, tapi disisi lain ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang menyangkut asas lex specialis derogat legi generalis dalam kasus ini asas lex systematische specialiteit mengingat Undang-undang Telekomunikasi dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan pidana khusus-juga perlu diperhatikan untuk menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan.

.....

Along with the advances of technology and communication, the 3G network become one of most needed limited resources for telecommunication industry. Government forced to manage and control the usage of that limited resources, one of them is the licensing mechanism on Telecommunication Act. Licensing is one kind of administrative law. The uneffectiveness of administrtrative sanctions made penal sanctions be the way to enforce the administrative norm, also known as administrative penal law. Lack of understanding about administrtive penal law by the law enforcement officers made confusion when there?s case that a violation of adinistrative penal law, in the same time breaking the law of Eradication of Criminal Acts of Corruption. A case like this can categorized as concursus idealis, but in the other side, we can?t avoid the provision of article 62 (2) of The Book of penal Code (KUHP) about lex specialis derogat legi generalis-in this case, lex systematische specialiteit, becasure both of the Telecommunication Act and Eradication of Criminal Acts of Corruption are special rules of criminal offences-also need to be considered to determine which provisions should be applied.